



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **UUS KUSWANTO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **45993**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.330.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 364 m2/384 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 3.130.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 741 m2/400 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 1.225.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 505 m2/500 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.310.000.000
4. Tanah Seluas 765 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 640 m2/400 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 324.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 95.700.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 326.821.684**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 7.076.521.684**



III. HUTANG

Rp. 801.997.154

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.274.524.530

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.